



**PENGATURAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**DI KOTA PAYAKUMBUH**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Hukum**

**Oleh:**

**Olvi Sri Hilda Haswin**

**2220113012**

**Pembimbing:**

**Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn**

**Dr. Anton Rosari, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

## **PENGATURAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PAYAKUMBUH**

(Olvi Sri Hilda Haswin, NIM 2220113012, 120 Halaman, Program Studi Magister  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024)

### **ABSTRAK**

Persetujuan Bangunan Gedung adalah perubahan nomenklatur dari Izin Mendirikan Bangunan. Perubahan ini terjadi semenjak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung baik membangun baru ataupun melakukan perubahan terhadap bangunan harus diiringi dengan kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung. Kewenangan PBG sudah tidak lagi berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Situs OSS (*Online Single Submission*) tetapi berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) yang dikelola Kementerian PUPR. Dalam perubahan ini yang menjadi permasalahan yang akan dikaji adalah : 1. Bagaimana pengaturan persetujuan bangunan gedung di Kota Payakumbuh. 2. Bagaimana manfaat yang dirasakan terhadap persetujuan bangunan gedung?. Untuk menjawab persoalan tersebut, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode wawancara. Data sekunder, diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh : 1. Dalam masa transisi perubahan IMB menjadi PBG, perda terkait PBG di Kota Payakumbuh belum ada, meskipun demikian, dinas PUPR dan DPMPTSP tetap melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya. 2. beberapa manfaat yang dirasakan jika memiliki PBG diantaranya Legalitas, Kemanan Dan Ketertiban, Komersial, Kemudahan Perizinan, Lingkungan Yang Sehat dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Didalam penelitian juga ditemukan Ada beberapa dampak yang ditimbulkan diantaranya berkurangnya pendapatan asli daerah, kemampuan dan kualifikasi pegawai, pemenuhan teknologi, masyarakat kurang memahami prosedur dan persyaratan permohonan PBG melalui sistem SIMBG dan Timpang Tindih Peraturan Terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

**Kata Kunci:** Pengaturan, Persetujuan Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan

# **LEGAL REGULATION OF BUILDING CONSTRUCTION APPROVAL IN PAYAKUMBUH CITY**

*(Olvi Sri Hilda Haswin, SID. 2220113012, 120 Pages, Master of Law Studies  
Program, University of Andalas, 2024)*

## **ABSTRACT**

*Building Approval is a change in nomenclature from Building Permit. It has been the case since Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation took effect. When organizing a building, whether constructing a new one or making changes to an existing one, ownership of the Building Approval (PBG) is required. The authority for issuing PBGs has shifted from the One-Stop Investment and Integrated Service (DPMPTSP) through the OSS Site (Online Single Submission) to the Public Works and Public Housing Office (PUPR) through SIMBG (Building Management Information System) managed by the Ministry of PUPR. In this change, the problems that will be studied are: 1. How is the building approval regulation in Payakumbuh City? 2. What is the benefits of having a PBG? The author uses empirical juridical research methods and a descriptive-analytical approach to answer these questions. The primary data in this research was obtained through interviews. Secondary data is obtained by conducting document studies. Data analysis is conducted qualitatively. The research yielded the following results: 1. During the transition period from IMB to PBG, there is no local regulation related to PBG in Payakumbuh City. However, the PUPR and DPMPTS offices continue to exercise their authority based on the law and its implementation regulations. 2. several benefits of having a PBG, including enhanced Legality, Security, Order, Commercial Advantages, Ease of Licensing, A Healthier Environment, and Increased Local Revenue. The research also identified Several impacts exist, including reduced local revenue, challenges in employee capabilities and qualifications, issues with technology implementation, a lack of community understanding regarding the procedures and requirements for PBG applications through the SIMBG system, and overlapping regulations related to Building Approval Retribution.*

**Keywords:** Regulation, Building Approval,